

BAB II

SEJARAH HUBUNGAN BILATERAL JEPANG – INDONESIA

A. Hubungan Bilateral Jepang-Indonesia Secara Umum

Sejarah panjang hubungan kerjasama antara Jepang dan Indonesia dimulai dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian antara Jepang dan Indonesia, serta Perjanjian Pampasan Perang 20 Januari 1958 di Jakarta. Pada perjanjian tersebut, terdapat wakil-wakil yang berkuasa penuh yang diangkat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu Aiichiro Fujiyama selaku Menteri Luar Negeri Jepang dan Soebandrio selaku Menteri Luar Negeri Indonesia untuk memeriksa surat-surat kuasa masing masing dan menandatangani perjanjian yang telah disepakati.

Adanya perjanjian tersebut, sebagai tanda berakhirnya perang antara Jepang dan Indonesia, dan memulai hubungan baru yang lebih menguntungkan kedua belah pihak. Disebutkan dalam pasal 6 Perjanjian Perdamaian, jika terjadi perselisihan mengenai masalah tafsiran atau pelaksanaan perjanjian, maka akan dilakukan perundingan sebagai penyelesaiannya. Namun, jika hal tersebut tidak juga memperoleh kesepakatan dalam waktu enam bulan sejak perjanjian tersebut diberlakukan, maka atas salah satu pihak yang berjanji dapat mengajukan

permasalahan tersebut ke Mahkamah Internasional untuk mendapatkan penyelesaian¹⁵.

Hasil dari perundingan perjanjian yang telah disepakati kemudian diratifikasi melalui UU No.13 tahun 1958 tanggal 27 Maret 1958/ LN No.31/TLN 1560¹⁶.

Setelah perjanjian perdamaian tersebut disepakati, Jepang mulai aktif memperbaiki *image* dirinya sebagai Negara yang kejam pada waktu kolonialisasi menjadi Negara pemberi bantuan pembangunan sebagai bentuk ganti rugi perang sesuai dengan perjanjian perdamaian San Fransisco 1951 kepada 12 negara di Asia termasuk Indonesia. Pemberian dana ganti rugi tersebut dimanfaatkan oleh Jepang untuk menjalin kerjasama ekonomi luar negeri sekaligus memberikan dukungan kuat bagi perkembangan Jepang selanjutnya.

Pada tahun 1960 untuk mendapatkan dukungan kuat dan pengaruh yang lebih besar di dunia maupun di kawasan, Jepang akhirnya bergabung dengan DAC (*Development Assistance Committee*). Melalui DAC tersebut, Jepang akhirnya dapat diterima menjadi anggota OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*). OECD merupakan organisasi yang mempunyai misi mempromosikan kebijakan yang akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan

¹⁵ Perjanjian Perdamaian Antara Djepang dan Republik Indonesia, Treaty, Diakses dari <http://www.gwu.edu/~memory/data/treaties/Indonesia.pdf> pada tanggal 19 Maret 2015

¹⁶ Japan (Jepang), (2008), Artikel online, Diakses dari <http://www.kemlu.go.id/Daftar%20Perjanjian%20Internasional/japan.htm> pada tanggal 20 Maret 2015.

sosial masyarakat di seluruh dunia dengan komitmen bersama untuk ekonomi pasar yang didukung oleh lembaga-lembaga demokratis dan fokus pada kesejahteraan semua warga negara¹⁷.

Atas diterimanya Jepang sebagai anggota OECD tersebut, mendorong Jepang untuk memberikan bantuan luar negeri kepada negara-negara berkembang kesempatan untuk mendorong liberalisasi perdagangan. Bentuk dari pemberian bantuan tersebut berupa bantuan dana dan teknik yang dibutuhkan untuk pembangunan sosial ekonomi. Demikian pula halnya dukungan untuk membantu para korban bencana, dan lain-lain. Bantuan tersebut diberikan Jepang melalui pemerintah sebagai pelaku utama yang kemudian disebut sebagai, "Bantuan Pembangunan Pemerintah (Official Development Assistance, ODA)¹⁸.

Di kawasan Asia, Jepang intensif memberikan dana bantuan ODA dan terutama kepada Indonesia, Negara yang posisinya sebagai bekas jajahannya namun kaya akan sumber daya mineral dibanding dengan Negara Asia lain . Hal tersebut Jepang lakukan untuk memperkuat *bargaining position* sebagai Negara pendonor terbesar, yang kemudian ia gunakan sebagai strategi kebutuhan ekspornya. Mengingat untuk mencukupi kebutuhan ekspornya Jepang butuh pasokan sumber daya mineral mentah yang akan Jepang olah menjadi barang jadi

¹⁷OECD Better Policies for Better Live, *The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*, Artikel dari OECD, Diakses dari <http://www.oecd.org/about/> pada tanggal 28 Maret 2015.

¹⁸Japan Official Development Assistance Indonesia, "Tentang ODA," *Sistim Bantuan ODA Jepang di Indonesia*, Artikel dari Website, Diakses dari http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_01.htm pada tanggal 24 Maret 2015.

dan setengah jadi. Berikut diagram perbandingan bantuan ODA Jepang dengan bantuan pemerintah asing dan LSM asing di Indonesia¹⁹:

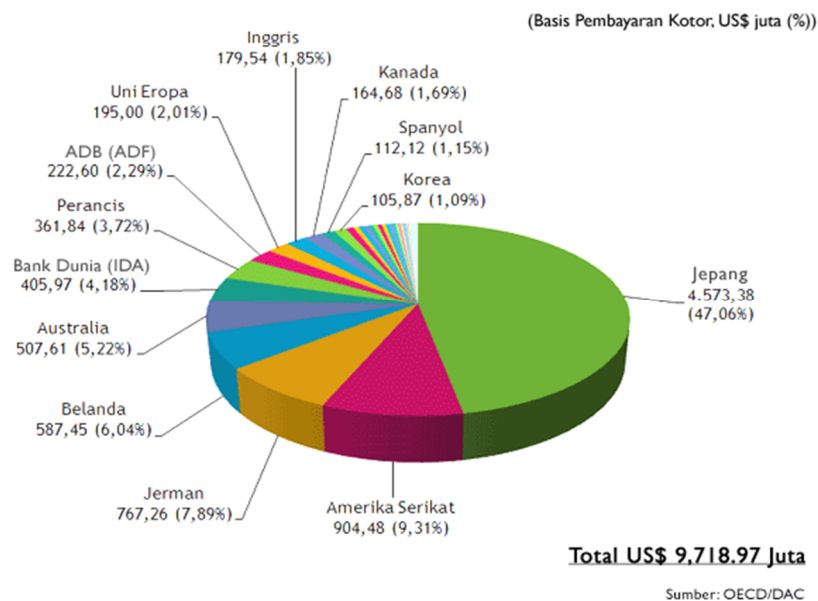


Diagram 2.1 Perbandingan Bantuan ODA Jepang di Indonesia dengan Bantuan Pemerintah Asing an LSM Asing (Total 2001 s/d 2005)

Sumber : Japan Official Development Assistance

Terbukti pada tahun 1960 Jepang memberikan bantuan hibah senilai 14,28 juta US\$ kepada Indonesia. Pemberian dana hibah tersebut, digunakan untuk membantu pembangunan Negara dan memberikan pintu masuk bagi kerjasama Jepang dengan Indonesia dalam perekonomian dalam bentuk promosi ekspor

¹⁹Japan Official Development Assistance Indonesia, "Statistik dan data", Artikel dari website, Diskses dari http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/datastat_02.htm pada tanggal 28 Maret 2015.

produk-produk Jepang dan impor bahan-bahan mentah, yang Jepang memanfaatkan untuk menunjang produksi industrinya²⁰.

Selain bantuan dana hibah, sistem bantuan ODA Jepang di Indonesia berupa pinjaman yen, dan kerja sama teknik. Adapun maksud dari pinjaman yen adalah pinjaman dana dengan persyaratan ringan, yaitu berjangka panjang dan bunga rendah, yang dibutuhkan negara berkembang, dalam rangka menata fondasi sosial ekonominya, yang akan menjadi dasar dari pembangunan. Pinjaman Yen ini dilaksanakan melalui, Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

Sedangkan kerja sama teknik merupakan kerjasama yang diberikan Jepang untuk membantu pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di negara-negara berkembang. Karena "upaya pembangunan manusia" akan memegang peranan penting dalam perkembangan sosial ekonomi dan Jepang berharap dengan adanya bantuan teknik tersebut, teknik serta pengetahuan dapat dialihkan kepada para teknisi dan pejabat dari negara berkembang. Kerjasama teknik Jepang diterapkan dengan cara mengundang tenaga magang, mengirim tenaga ahli dan relawan, mengirim bantuan mesin dan peralatan, survey melalui badan pemerintah independen yang bernama, "Japan International Cooperation Agency (JICA)".

²⁰Inoguchi Takashi and Purnendra Jain, *Japanese Foreign Policy Today A Reader*, (New York: Palgrave, 2000), Hlm. 152-157.

Bagi Indonesia, Jepang adalah negara pendonor terbesar, demikian juga bagi Jepang, Indonesia adalah negara penerima bantuan terbesar. Hal itu dapat dilihat secara kumulatif nilai realisasi bantuan ODA Jepang di Indonesia dengan total kumulatif sampai tahun 2006 dapat dilihat di Tabel 2.1 Terlampir.

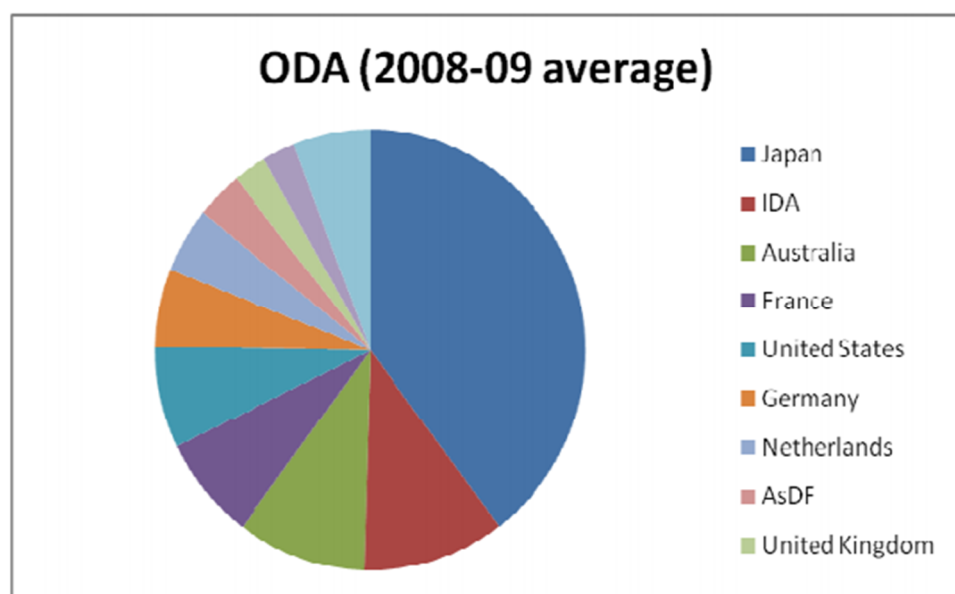


Diagram 2.2 Sepuluh Negara Donor ODA di Indonesia

Sumber: (<http://energy-indonesia.com/datapdf/nihon-indo-relation.pdf>.)

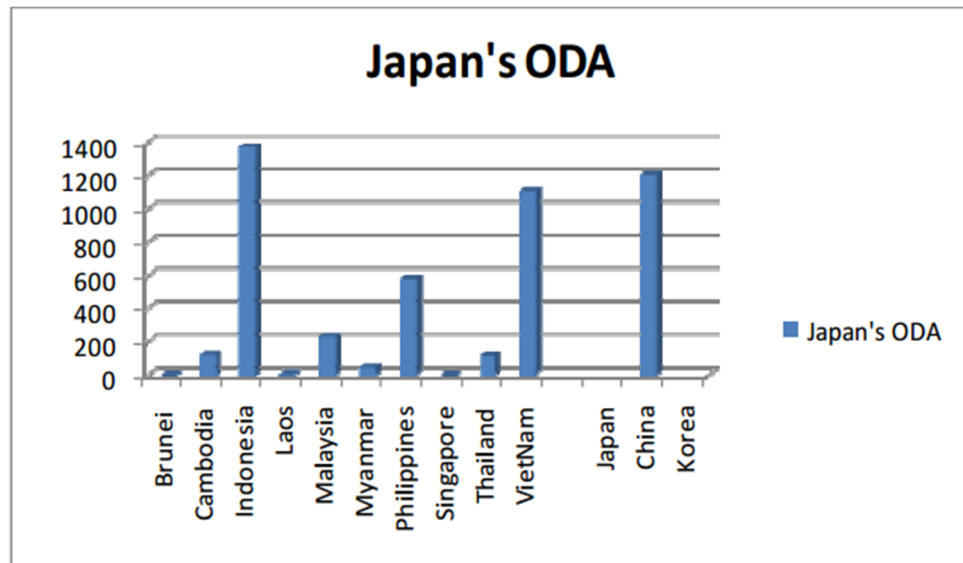


Diagram 2.3 Bantuan ODA Jepang di ASEAN (rata-rata tahun 2008-2009)
Dalam US\$

Sumber : (<http://energy-indonesia.com/datapdf/nihon-indo-relation.pdf>)

Jepang membantu Indonesia yang sedang berusaha keluar dari krisis pada tahun 1997 dalam bentuk pinjaman khusus, perpanjangan kewajiban pembayaran, dukungan strategi pemerintah, dan lain-lain.

Begitu pula ketika gempa besar dan tsunami dari lautan Hindia melanda pulau Sumatra pada Desember 2004, Jepang menyediakan dana rekonstruksi dan rehabilitasi untuk korban bencana sebesar 640 juta US Dollar. Hingga sampai saat ini Jepang menjadi mitra donor telah terhitung selama setengah abad. Kemitraan tersebut meluas ke beberapa sektor; sektor energy, sektor transportasi, sektor

pertanian, perkebunan, dan perikanan, sektor kesehatan, dan kebersihan, sektor informasi dan komunikasi, sektor governance, dan sektor penanggulangan bencana²¹. Berikut diagram bantuan hibah yang Jepang salurkan ke Indonesia:

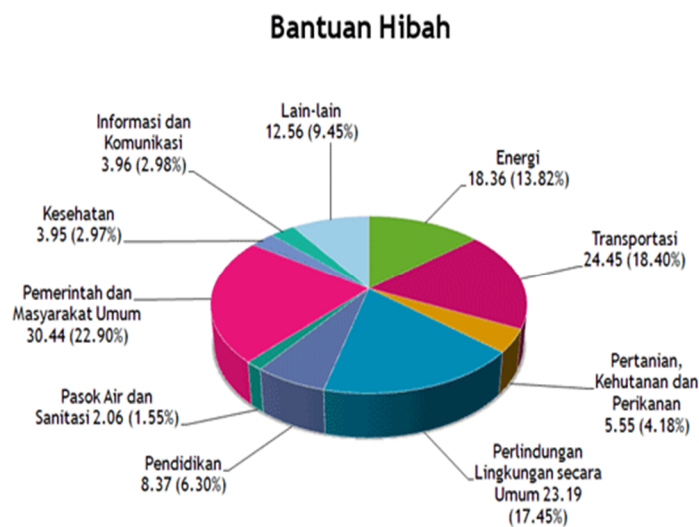


Diagram 2.4 Bantuan ODA Jepang dalam Bentuk Hibah

Sumber : Japan Official Development Assistance

Akan tetapi, bantuan ekonomi yang Jepang berikan ditanggapi kritis, terutama oleh kalangan mahasiswa. Jepang dianggap sebagai Negara penjajah yang hanya mengeksploitasi sumber daya alam dengan memberikan ganti yang tidak seimbang. Mereka bahkan menuduh para pengusaha Jepang melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dengan pejabat local, sehingga Jepang dapat memperoleh proyek apapun yang mereka inginkan.

²¹ Opcit.

Puncak dari kemarahan mereka terjadi saat Perdana Menteri Kakuei Tanaka mengunjungi Jakarta. Berdasarkan kejadian tersebut, menjadi pukulan bagi Jepang untuk berusaha memperbaiki hubungan diplomatiknya dengan mengubah arah politik luar negerinya untuk mengurangi ketegangan. Arah kebijakan politik luar negeri Jepang, berhasil diperbaiki dalam kurun waktu tiga tahun melalui Perdana Menteri Takeo Fukuda dengan *heart-to-heart diplomacy*.

Perubahan kebijakan tersebut dianggap penting dalam perjalanan Jepang di Asia Tenggara menjelang kejatuhan Amerika di tangan Vietnam. *Heart-to-heart diplomacy* merupakan cara untuk menyembuhkan luka lama dan berjanji akan memberikan bantuan sebanyak satu juta dollar Amerika. Meskipun janji tersebut tidak sepenuhnya dipenuhi negara-negara ASEAN yang di dalamnya termasuk Indonesia memutuskan untuk belajar lebih banyak dari Jepang mengingat kemunduran Amerika dari Asia Tenggara membuat ASEAN membutuhkan pelindung yang baru, terutama dibidang ekonomi²².

Selain aktif di kawasan Asia, Jepang juga bergabung dalam Negara G-20 bersama Indonesia. G-20 atau kelompok 20 ekonomi utama dunia merupakan kumpulan 19 negara dan Uni Eropa yang awalnya terbentuk untuk merespon adanya krisis ekonomi 1998, dengan menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia. Forum G-20 menjadi forum konsultasi dan kerja sama untuk mengarah pada

²²Bambang Cipto, "Hubungan Internasional di Asia Tenggara", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 184-186.

stabilitas keuangan internasional dan mencari upaya-upaya pemecahan masalah yang tidak dapat diatasi oleh satu negara tertentu.

Hubungan Jepang dan Indonesia semakin terintegrasi dengan ditandatanganinya berbagai bentuk kerjasama *Strategic Partnership for Peaceful and Prosperous Future* yang didasarkan atas *the Japan – Indonesia Joint Statement Partners for New Challenges*. Kerjasama tersebut ditandatangani pada bulan Juni 2005 dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Jepang, serta upaya untuk menggali kemungkinan-kemungkinan baru untuk meningkatkan hubungan Negara secara kongkrit²³.

B. Kerjasama Jepang dan Indonesia di Bidang Ekonomi

Jepang dan Indonesia telah mempertimbangkan kedepan arah hubungan kerjasamanya harus bergerak. Hubungan ekonomi Jepang-Indonesia muncul ketika kedua Negara tersebut menyadari pentingnya menanamkan modal dalam sisitim ekonomi dunia yang semakin mengglobal dan untuk meningkatkan pembangunan Negara. Oleh karena itu, pada tanggal 1 juli 1961, Jepang dan Indonesia menandai awal hubungan persahabatan dan perdagangan mereka dengan penandatanganan “*Agreement on Amityrelations and Commerce*”. Kemudian menyusul tahun 1963 Jepang dan Indonesia membuka jalur penerbangan diantara keduanya untuk mempermudah akses perdagangan.

²³Nurul Laili, *Bahasa Jepang Pilihan Menuju Entrepreneur*, Jurnal Online, Diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=116613&val=5316> pada tanggal 25 Maret 2015.

Hubungan kerjasama ekonomi Jepang dan Indonesia semakin menguat setelah Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.

Dalam melakukan investasi Jepang merupakan Negara yang sangat teliti untuk memilih asset-aset yang produktif. Biasanya asset-aset tersebut berupa pembelian tanah, pembelian atau konstruksi pabrik, pemberian lisensi, penggunaan teknologi, dan penambangan mineral. Asset-aset tersebut dapat berupa kepemilikan penuh atau hampir penuh. Maka, di tahun 1968 Jepang menunjukkan adanya surplus yang stabil dan pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan tingkat 10,8%²⁴.

Namun, pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi dunia, sehingga kondisi perekonomian Indonesia melemah. Iklim investasi antara Jepang dan Indonesia pun ikut berpengaruh. Berikut gambaran perdagangan dan investasi antara Jepang dan Indonesia dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001:

²⁴ Sitta Hidriyah, "Fluktuasi Investasi Jepang ke Indonesia Periode 2001-2007", Thesis dari Universitas Indonesia, 2008.

Tabel 2.2 Trend Perdagangan Jepang - Indonesia

		1997		1998		1999		2000		2001 (Jan-Maret)	
		Value	%	Value	%	Value	%	Value	%	Value	%
Export	Non-Oil&Gas	6,940	- 1,1	5,339	- 23,1	5,698	6,7	7,399	29,9	1,917	13,4
	Oil&Gas	5,545	- 5,5	3,777	- 31,9	4,700	24,4	7,016	49,9	1,759	23,9
	Total	12,485	- 3,1	9,116	- 27,0	10,398	14,1	14,415	38,6	3,676	18,2
Import	Non-Oil&Gas	8,232	- 3,0	4,279	- 48,0	2,899	- 32,3	5,379	85,5	1,531	58,8
	Oil&Gas	0,020	0,0	0,014	- 30,0	0,015	5,0	0,018	24,5	0,003	- 73,0
	Total	8,252	- 3,0	4,293	- 48,0	2,914	- 32,1	5,379	85,2	1,534	57,3

Value dalam US\$ milyar Sumber data dari BPS

Tabel 2.3 Trend Investasi Jepang - Indonesia

Year	1997			1998			1999			2000			2001 (Jan-July)		
	P	I	%	P	I	%	P	I	%	P	I	%	P	I	%
New Investment	87	3,908	3,9	70	0,372	- 90,5	64	0,168	- 54,8	82	1,066	534,5			
Expansions	76	1,253	- 45,2	48	0,719	- 42,6	71	0,474	- 34,1	111	0,861	81,6			
Change of Status	7	0,260	- 83,8	8	0,240	- 7,7	6	0,002	- 99,2	11	0,027	1250,0			
Total	94	5,421	- 29,2	78	1,331	- 75,4	70	644	- 51,6	93	1,954	203,4	58	0,513	- 59,7

#P : Jumlah Proyek #I : Nilai Investasi #% : Perbandingan dengan tahun sebelumnya
 Nilai Investasi dalam US\$ milyar Sumber data dari BKPM

Kondisi perdagangan investasi tahun (2002-2006) cukup stabil. Sehingga tepat pada 20 Agustus 2007, dua tahun setelah ditandatanganinya *the Japan – Indonesia Joint Statement Partners for New Challenges*, Jepang dan Indonesia membentuk Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) di Jakarta. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo ABE. Kedua Negara tersebut menginginkan adanya hubungan kerjasama yang lebih komprehensif untuk peningkatan kapasitas, liberalisasi, promosi dan fasilitasi perdagangan dan investasi antara kedua Negara, sehingga terbentuklah IJEPA. EPA memberikan

kita kesempatan untuk mengimpor produk dari Jepang dengan tarif yang rendah ataupun nol, pembebasan atau memfasilitasi bergeraknya sumber daya manusia, barang dan modal, dengan berpusat pada Free Trade Agreement.

Free Trade Agreement tersebut merupakan perjanjian bilateral atau regional yang menghapuskan atau mengurangi pembebanan biaya impor pada barang atau liberalisasi perdagangan jasa (penghapusan atau penurunan tarif dan pembatasan penanaman modal asing) antar kawasan tersebut. Adapun kerjasama IJEPA ini, mencakup 11 bidang yaitu²⁵:

1. Trade In Goods

Dalam perdagangan internasional antar Negara tidak dipungkiri adanya keinginan untuk meningkatkan kebebasan perdagangan. Adanya kesepakatan IJEPA pada bidang ini, dilakukan dengan menghilangkan atau mengurangi tarif komprehensif. Oleh karena itu pada kasus ini, ada beberapa komitmen utama demi terciptanya kontribusi perluasan perdagangan antara Jepang dengan Indonesia, yaitu pertanian, kehutanan, sektor perikanan dan sektor industri demi terciptanya daya saing Indonesia pada sektor tersebut.

2. Trade in Services

²⁵Ministry of Foreign Affairs of Japan, "Joint Press Statement Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement", Artikel Online, Diakses dari <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/joint0611-2.html> pada tanggal 26 Maret 2015.

Bidang kedua ini meliputi professional/bisnis, komunikasi, konstruksi, distribusi, pendidikan, keuangan, kesehatan, sosial pariwisata, dan perjalanan terkait, jasa transportasi.

3. Customs Procedures

Jepang dan Indonesia, akan mempromosikan pertukaran informasi dan kerjasama untuk tujuan memfasilitasi perdagangan melalui penyederhanaan dan harmonisasi prosedur kepabeanan, dan memastikan penegakan hukum yang efektif.

4. Investment

Pada perjanjian ini akan dibuat sebuah kerangka kerja untuk mengembangkan lebih lanjut fasilitasi investasi lintas-perbatasan antara kedua negara melalui komitmen pengobatan pengobatan nasional, investasi yang deal berdasarkan minat kedua negara, larangan persyaratan kinerja, penyelesaian sengketa antara negara dan investor, dan meningkatkan perlindungan investor dan investasi.

5. Movements of Natural Persons and Related Cooperation

Kedua belah pihak akan menyediakan kerangka kerja untuk memfasilitasi pergerakan orang alami dalam berbagai kategori termasuk pengunjung jangka pendek bisnis, transferes intra-perusahaan, investor dan layanan profesional. Dalam konteks yang sama, kedua belah pihak juga akan membentuk skema penerimaan perawat dan *caregivers*. Dengan demikian diharapkan tercipta sebuah kerjasama terkait dan menguntungkan dengan mempertimbangkan perluasan cakupan "Pelatihan Industri dan Teknik Program Magang".

6. Energy and Mieral Resources

Energy dan sumber daya mineral merupakan hal strategis untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan ini, sehingga demi tercipta tujuan bersama kedua belah pihak akan melakukan koordinasi untuk mempromosikan dan memfasilitasi investasi di sektor ini, dan memberikan kontribusi untuk meningkatkan keamanan pasokan energi dan sumber daya mineral dengan memperkuat dialog kebijakan dan kerjasama.

7. Intellectual Property

Adanya IJEPA diharapkan akan memberikan landasan kedua belah pihak untuk bekerja sama dibidang kekayaan intelektual, dengan cara memastikan perlindungan yang memadai dan efektif kekayaan intelektual, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi sistem perlindungan kekayaan

intelektual, dan memberikan langkah-langkah untuk penegakan hak kekayaan intelektual terhadap pelanggaran, pemalsuan dan pembajakan.

8. Government Procurement

IJEPA akan menyediakan kerangka kerja untuk pertukaran informasi melalui titik kontak dan mekanisme untuk dialog dengan partisipasi dari kedua Pemerintah, sektor swasta masing-masing dan organisasi terkait lainnya. Kedua Pihak akan meningkatkan kerja sama teknis di daerah ini dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi.

9. Competition

Kedua belah pihak akan mempromosikan kompetisi dengan mengatasi kegiatan anti-kompetitif di wilayah masing-masing dan bekerja sama dalam memperkuat kebijakan persaingan dan pelaksanaan undang-undang persaingan, sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing.

10. Improvement of Business Environment and Promotion of Business Confidence

IJEPA akan menyediakan mekanisme bagi peningkatan lingkungan bisnis dan promosi kepercayaan bisnis, dengan partisipasi dari kedua Pemerintah, sektor swasta masing-masing dan organisasi terkait.

11. Cooperation

Kedua belah pihak akan meningkatkan kerjasama bilateral untuk peningkatan kapasitas di berbagai bidang, yaitu industri manufaktur, pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan dan promosi investasi, pengembangan sumber daya manusia, pariwisata, teknologi informasi dan komunikasi, jasa keuangan, pengadaan pemerintah, lingkungan, dengan maksud untuk memperkuat kemitraan ekonomi antara mereka. Mereka juga dapat mempertimbangkan bidang-bidang kerjasama yang disepakati bersama di masa depan.

IJEPA ini terbentuk berdasarkan beberapa pertimbangan dari masing-masing Negara yang bersangkutan. Bagi Indonesia, Jepang merupakan mitra dagang terbesar dengan tujuan ekspor mencapai kurang lebih 20% dan sumber Impor mencapai kurang lebih 14%. Jepang merupakan sumber utama investasi dan pengembangan pinjaman dan bantuan. Sedangkan bagi Jepang, Indonesia merupakan salah satu Negara sebagai sumber impor terbesar dan merupakan pasar yang strategis untuk ekspor produk-produk Jepang²⁶. Diharapkan dengan dibentuknya IJEPA ini, akan mendorong Jepang maupun Indonesia agar dapat menciptakan iklim kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan.

²⁶Ministry of Trade The Republik of Indonesia, "Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) and Its Effects on Indonesian and Japanese Economy", Artikel Online, Diakses dari <http://www.indonesia-investments.com/upload/documents/Indonesia-Japan-Economic-Partnership-Agreement-IJEPA-Indonesia-Investments.pdf> pada tanggal 26 Maret 2015.

C. Kerjasama Jepang dan Indonesia di Bidang Pertambangan

Sebelum Indonesia dan Jepang menjalin kerjasama di bidang pertambangan, Jepang pernah memberikan kontribusi pertambangan di Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Kehadiran Jepang pada tahun 1942 merebut kekuasaan Hindia Belanda yang telah lebih dulu menguasai Indonesia sebagai wilayah jajahannya.

Perebutan kependudukan tersebut, termasuk dengan mengambil alih Mijnbouw (Dienst van het Mijnbouw- Dinas Pertambangan bentukan Hindia Belanda pada tahun 1850) dengan segala sarana dan dokumennya. Kantor Mijnbouw tersebut kemudian diganti nama menjadi *Chisitsu Chosasho*. Namun, pengambil alihan tersebut tidak bisa bertahan lama dikarenakan ketiadaan tenaga ahli dan anggaran. Sampai akhirnya Jepang terdesak oleh sekutu dengan di bom atomnya kota Nagasaki dan Hiroshima membuat Jepang dengan diam-diam disingkirkan oleh bangsa Indonesia. Sejak saat itu nama kantor *Chisitsu Chosasho* diubah menjadi Poesat Djawatan Tambang dan Geologi²⁷.

Indonesia paska kemerdekaan mengalami ketidakstabilan politik, ekonomi dan budaya. Tekanan dari dalam negeri maupun luar negeri membuat Indonesia pada masa kepemimpinan Soekarno mengalami kemandegan. Pada tahun 1960an, hutang dan inflasi membuat perekonomian Negara baru ini hancur. Pendapatan

²⁷Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Kilas Balik Sejarah Pertambangan dan Energi Di Indonesia", Artikel Online, Diakses dari <http://esdm.go.id/berita/37-umum/2059-kilas-balik-sejarah-pertambangan-dan-energi-di-indonesia.html?tmpl=component&print=1&page=> pada tanggal 30 Maret 2015.

devisa dari sektor perkebunan jatuh dari 442 juta dollar Amerika Serikat (AS) pada tahun 1958 ke 330 juta dollar AS di tahun 1966. Puncak inflasi berada di atas 100% (*year-on-year*) pada tahun (1962-1965). Salah satu penyebab inflasi adalah karena pemerintah dengan mudahnya mencetak uang untuk membayar hutang dan mendanai proyek-proyek megah (seperti pembangunan Monas). Dampak dari inflasi menjadikan pendapatan per kapita Indonesia turun secara signifikan (terutama di tahun 1962-1963).

Sementara itu, bantuan asing yang sangat dibutuhkan pada saat itu tiba-tiba berhenti mengalir, setelah Sukarno menolak bantuan dari AS dan mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena masuknya Malaysia sebagai negara anggota PBB (Indonesia menentang pendirian Malaysia pada tahun 1963).

Pada kondisi yang sama, Sukarno justru menjalin hubungan lebih erat dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Korea Utara. Sampai akhirnya tepat 22 tahun Soekarno memegang tampuk kepemimpinan, Indonesia goyah dengan paham nasionalisme, agama, komunis, dan militer (NASAKOM) yang Soekarno ramu²⁸.

Kemudian pada 1967 kepemimpinan Soekarno resmi digantikan oleh Soeharto. Melihat kondisi bangsa yang mengalami keterpurukan ekonomi,

²⁸Indonesia-Investment, "Sejarah Indonesia: Politik dan Ekonomi di Bawah Soekarno", Artikel Online, Diakses dari <http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/kolom-budaya/sejarah-indonesia-politik-dan-ekonomi-di-bawah-sukarno/item5271> pada tanggal 30 Maret 2015.

Soeharto memfokuskan pembangunan ekonomi dengan mengandalkan sebuah tim ahli ekonomi yang dilatih di Amerika Serikat untuk memulai periode rehabilitasi dan pemulihan ekonomi.

Berbeda dengan Soekarno yang sangat Anti-Barat, Soeharto lebih dapat berpandangan luas. Bahwa kondisi pada saat itu, Indonesia sangat membutuhkan suntikan dana dan investasi dari pihak asing²⁹. Sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Penanaman Modal Asing pada tahun 1967. Dengan adanya kebijakan tersebut membawa “angin segar” bagi perekonomian Indonesia. Penanaman modal asing tersebut dimulai dengan dibukanya investasi dibidang pertambangan yang dilakukan melalui Kontrak Karya (KK) sedangkan dibidang batubara dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)³⁰.

Mengetahui Indonesia mengeluarkan kebijakan Penanaman Modal Asing, Jepang kembali “melirik” Indonesia sebagai Negara tujuan Investasinya dibidang pertambangan setelah sebelumnya ditahun 1942 pernah beroperasi melalui perusahaan Sumitomo Metal Mining Company yang saat itu produksinya kurang lebih sekitar 27,000 ton nikel dan 58,000 ton pada tahun 1944. Namun oprasi tersebut terhenti sejak Indonesia merdeka. Kemudian Pada awal tahun 1950an perusahaan pertambangan jepang Sumitomo Metal Mining Company mulai tertarik kembali untuk melakukan eksplorasi di Pomala bersamaan dengan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Opcit.*

Freeport Sulphur Co dan Oost Borneo Maatschappij. Di tahun 1957 perusahaan NV Petro memanfaatkan sisa produksi pertambangan nikel untuk kemudian diekspor ke Jepang.

Pada tahun 1961 NV Petro berganti nama menjadi PT Pertambangan Nikel Indonesia, sampai akhirnya yang kita kenal menjadi PT Aneka Tambang (PT Antam). Perusahaan ini memproduksi feronikel (FeNi I dan FeNi II) dengan kapasitas produksi 11.000 ton naik menjadi 9.221 ton pada tahun 1999. Dengan keuntungan produksi yang demikian, maka PT Antam berencana untuk membuka proyek produksi FeNi III di Pomala tahun 2003 dengan perkiraan produksi 24.000 tons nikel/tahun dengan biaya US \$ 270 juta.

Proyek ini mengundang perhatian perusahaan Mitsui & Co. dari Jepang dan Krupp Tyssen Nirosta GmbH dari Jerman untuk bersaing mendapatkan tender tersebut. Proyek tersebut Indonesia butuhkan untuk membantu Indonesia mengeksplorasi dan eksploitasi Nikel Indonesia yang belum mencapai target produksi.

Menurut data survey kekayaan sumber daya nikel Indonesia pada tahun 2000 mencapai 8% total nikel dunia dengan cadangannya mencapai 13 juta ton dan berhasil melakukan eksplorasi 71.353 metrik ton dengan bantuan PT Inco

senilai 60.353 metrik ton sedangkan sisanya oleh PT Antam. Hasil eksplorasinya diorientasikan untuk di ekspor ke Australia dan Jepang³¹.

Pada tahun 1968 Pemerintah Indonesia membuka tender dibidang pertambangan nikel, beberapa perusahaan Jepang turut serta. Perusahaan tersebut yaitu Kaiser Aluminium, Cemical Corporation, Fuji Iron Steel Co., Sumitomo Metal Mining Co., Nippon Yakin Kogyo Co. Ltd., Pasifik Nickel Co. Ltd., dan Sumitomo Shoji Kaisha Ltd. Namun saat itu PT INCO yang berhasil memenangkan tender tersebut.

1. Profil PT INCO

Pada 27 Juli 1968 generasi kedua perusahaan nikel dalam bentuk PT International Nickel Indonesia telah memenangkan tender dari tiga kelompok besar perusahaan mining asing. Di dalam PT Inco terdapat beberapa perusahaan Jepang yang mengambil bagian saham, meskipun 59% saham masih dimiliki oleh Inco Ltd.

Namun, pada tahun 1988, Inco Ltd menjual sahamnya, 20 persen saham PT Inco ke Sumitomo Metal Mining Co, dengan nilai US \$ 100 juta dan juga terdapat

³¹ Anto Sangadji, "Japanese Involment in Nickel Mining IN Indonesia", Artikel Online, Diakses dari http://www.eca-watch.org/problems/asia_pacific/indonesia/japan_inco.pdf pada tanggal 31 Maret 2015.

beberapa perusahaan Jepang yang membeli saham. Berikut penjabaran perusahaan yang menanamkan saham di PT Inco³²:

Tabel 2.4 Struktur Pemegang Saham dari PT Inco

Pemegang Saham	Persentase
Inco Ltd.	58.73
Sumitomo Metal Mining Co.	20.00
Tokyo Nickel Company, Ltd.	0.54
Nissho-Iwa Ltd.	0.14
Sumitomo Shoji Kiasha	0.14
Mitsui & Co Ltd.	0.36
Public	20.00

³² *Ibid.*

Sumitomo Metal Mining Co merupakan perusahaan Nikel terbesar Jepang yang juga mengambil peranan dalam Sumitomo *Zaibatsu* Group³³. Selain menanamkan investasinya di PT Inco, Jepang juga memiliki saham senilai 27.56% di Nusa Tenggara Mining Corporation³⁴. Banyaknya investor Jepang yang menanamkan investasinya di Indonesia membuat hubungan perdagangan antara Jepang dan Indonesia semakin erat. Bahkan semakin baik, mengingat Indonesia merupakan tujuan impor utama Jepang di bidang nikel yang digunakan untuk menyokong industri manufakturnya.

Namun, keadaan tersebut berbalik setelah tahun 2009 Pemerintah Indonesia mengundangkan kebijakan barunya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang membuat guncangan hebat investor dan industri pemurnian mineral Jepang yang di Jepang. Pasalnya mereka khawatir, dengan adanya kebijakan tersebut akan membuat iklim ekspor-impor Jepang terganggu terutama bidang manufaktur dan otomotif.

³³ *Ibid.*

³⁴ Mining Technology.Com, "Batu Hijau Copper-Gold Mine, Indonesia", Artikel Online, Diakses dari <http://www.mining-technology.com/projects/batu/> pada tanggal 31 Maret 2015.